

LATAR BELAKANG PERPINDAHAN PUSAT KESULTANAN DELI DARI PEKAN LABUHAN KE KOTA MEDAN

Jufrida
Balai Arkeologi Medan

Abstract

At the end of 19th century, the center of government of Sultanate Deli moved from north to south area – now, known as Medan. It is not simply effort to avoid marshy coast region. Other factors are the river estuary superficiality which causing degradation of environmental quality that impact to various life aspect.

Kata kunci: ekologi, sosial politik, ekonomi

I. Pendahuluan

Terdapat sebuah kecenderungan umum bahwa pemilihan tapak atau lokasi sebuah pusat institusi pemerintahan, kesultanan misalnya, dengan perkampungan-perkampungannya berhubungan erat dengan kondisi ekologi, kehidupan sosial budaya, dan tingkat pengetahuan/kemampuan teknologi masyarakat itu sendiri. Pada masa lalu sungai maupun bentuk perairan lainnya merupakan faktor pendorong pengembangan teknologi transportasi yang memudahkan terjadinya hubungan satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini juga sekaligus menjadikannya sarana hubungan antar kelompok masyarakat sekaligus antar kelompok budaya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kontak perdagangan juga terjadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan suatu daerah atau kelompok masyarakat akan komoditas tertentu yang diperlukan bagi kehidupannya, sementara daerah atau kelompok masyarakat lain memiliki atau menghasilkannya. Pada kesempatan tersebut pedagang memegang peran sebagai perantara bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Adapun perahu sebagai sarana transportasi dalam aktivitas tersebut menjadi sangat diperlukan. Dalam konteks ini tidak mengherankan bila sebuah kerajaan -atau bentuk kekuasaan lainnya- yang sudah pernah ada pada jalur transportasi (sungai) akan tetap mencari lingkungan yang sama apabila mengalami perpindahan tempat. Jadi bukan hal yang mengherankan bila –melalui beberapa sumber– diketahui bahwa pada umumnya kerajaan-kerajaan kuno tumbuh dan berkembang di pesisir, di muara-muara sungai besar, di lembah-lembah yang subur seperti kerajaan Samudera Pasai, Banten dan lain-lain (Tjandrasasmita, 1985:160--162).

Demikian halnya dengan Kesultanan Deli di pesisir timur Sumatera, yang dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami perpindahan pusat pemerintahan, bermula dari daerah Deli Tua, kemudian Labuhan Deli, dan kelak ke daerah yang sekarang dikenal sebagai pusat Kota Medan. Tampaknya situasi ini berlangsung untuk memperjuangkan eksistensi dan kebesaran

kerajaannya. Bagi Kesultanan Deli, faktor ekologi, ekonomi, dan sosial-politik merupakan faktor pendorong terjadinya perpindahan itu. Dalam kesempatan ini, faktor ekologi akan menjadi titik berat perhatian mengingat keletakan pusat-pusat pemerintahannya yang walaupun berpindah-pindah namun selalu berada di lingkungan tepian sungai.

II. Sekilas sejarah Kerajaan Deli

Sumber lokal menceritakan bahwa Kerajaan Deli bermula dari seseorang yang berjuluk Lebai Hitam yang dapat menaklukan beberapa daerah di pesisir timur Sumatera hingga bagian selatan Aceh. Atas jasanya tersebut Sultan Aceh menganugerahinya gelar Gocah Pahlawan yang selanjutnya dipercaya untuk memimpin sebuah kawasan yang wilayahnya meliputi Percut hingga Medan Deli. Selain itu, sebagai hadiah perkawinannya dengan salah seorang putri Datuk Sunggal, sebagian daerah pesisir juga turut menjadi wilayah kekuasaannya (Sinar,1996:23-24).

Dikisahkan bahwa sepeninggal Gocah Pahlawan, Tuanku Panglima Perunggit sebagai putra mahkota menggantikannya sebagai pemimpin di wilayah kekuasaannya. Pada masa pemerintahannya di pertengahan abad ke-17, Kerajaan Aru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Aceh yang pada saat itu melemah akibat terjadinya pertikaian dalam negeri. Dipercaya bahwa mulai saat itu nama Kerajaan Aru tidak muncul lagi, dan sebaliknya nama Kerajaan Deli sebagai penggantinya. Nama Deli sendiri kemungkinan dikaitkan dengan nama daerah tempat pusat pemerintahan sebelumnya.

Di dalam catatan Sejarah Deli, Tuanku Panglima Perunggit memindahkan pusat kekuasaannya ke Kampung Medan Deli, yang disebutkan terletak di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura di tengah Kota Medan sekarang. Beberapa tahun setelah menjalani pemerintahan, Tuanku Panglima Perunggit meninggal dunia dan digantikan oleh puteranya yang bernama Tuanku Panglima Paderap. Saat itu pusat pemerintahan dialihkan ke Kampung Pulo Brayan yang berada tidak jauh di hilir Kampung Medan Deli (Husny,1975:95). Peristiwa tersebut dipercaya terjadi pada tahun-tahun pertama abad ke-18. Sekitar dua puluh tahun setelah kejadian itu, sepeninggal Tuanku Panglima Paderap, muncullah perebutan kekuasaan antara putera mahkota dengan putera lain dari selir raja. Perseteruan yang tidak terelakkan itu menjadikan Kerajaan Deli pecah menjadi Kesultanan Deli dan Kerajaan Serdang. Kelak Pasutan Gandar Wahid menjadi penguasa Kesultanan Deli sedangkan Tuanku Umar memerintah di Kerajaan Serdang (Sinar,1971:33)

Sejak masa pemerintahan Pasutan Gandar Wahid - yang meninggal pada tahun 1814 - pusat pemerintahan dipindahkan ke Labuhan yang dikenal sebagai Pekan Labuhan, dan kelak dengan nama Labuhan Deli. Adapun pemerintahan Sultan Panglima Mangedar Alam

berlangsung setidaknya hingga tahun 1823, sebagaimana dikatakan oleh John Anderson saat mengunjungi tanah Deli, bahwa yang berkuasa di kerajaan ini adalah Sultan Panglima Mangedar Alam. Tahun berikutnya 1824 pemerintahan sudah beralih ke Sultan Osman yang berlanjut hingga tahun 1858. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam, dan hingga masa pemerintahannya tercatat bahwa pendapatan Kesultanan Deli dari dermaga Labuhan cukup besar (Jufrida & Soedewo, 2004:31--32).

Pemindahan pusat pemerintahan yang terjadi pada masa pemerintahan Pasutan Gandar Wahid, dari Deli Tua yang berada di daerah hulu ke Labuhan di daerah hilir sangatlah tepat. Hal tersebut karena sejak saat itu arus perdagangan dengan dunia luar terjalin lebih intensif. Terbukanya pelabuhan di wilayah sekitar istana Kerajaan Deli ke dunia luar membuat kerajaan ini semakin makmur. Dermaga Labuhan Deli yang relatif kecil semakin hari menjadi sebuah dermaga yang dapat menampung berbagai komoditi, yang perdagangan/pertukarannya melibatkan para pedagang, pendatang, dan penduduk setempat.

Kemakmuran Kerajaan Deli diwujudkan melalui pembangunan sebuah mesjid megah, yakni Mesjid Raya Al-Osmani yang berasal dari masa pemerintahan Sultan Osman. Mesjid ini pada awalnya dibangun semi permanen dengan bahan kayu yang didatangkan dari Penang. Pada tahun 1854 mesjid ini dibangun dan hingga kini masih dapat dilihat kemegahannya, dengan beberapa kali perbaikan namun tidak meninggalkan bentuk aslinya.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Perkasa Alam terbukalah peluang bagi para investor untuk mengolah tanah di wilayah kekuasaannya. Secara geografis, Sumatera Timur merupakan wilayah tropis yang potensial dijadikan areal pertanian dan perkebunan. Tanah-tanah di wilayah kekuasaannya merupakan hasil akumulasi endapan tanah alluvial yang terjadi akibat proses erosi oleh air sungai selama bertahun-tahun, terutama pada wilayah dataran rendah hingga pesisir di Selat Malaka. Kondisi tanah seperti ini sangat mendukung pertumbuhan tembakau Deli yang berkualitas. Wilayahnya sangat mendukung pertumbuhan budidaya tembakau pembalut cerutu yang baik, karena sering mengalami kondisi *cloudiness*, yakni kondisi ketika langit sering ditutupi oleh awan pada siang hari sehingga kelembaban udara yang ditimbulkan dapat merangsang pertumbuhan daun (Pelzer, 1985:31).

Tercatat dalam sejarah, Nienhuys merupakan orang pertama yang mendapat izin melakukan pengolahan lahan untuk ditanami tembakau. Sebagai tahap percobaan pada tahun 1864 Sultan Deli memberi lahan kepada Nienhuys untuk ditanami tembakau sebanyak yang ia kehendaki tanpa meminta sewa atas tanah yang dipakainya (Bremen, 1997:22). Keberanian Nienhuys membuka perkebunan tembakau berskala besar itu kemudian terbukti membawa keuntungan besar, karena harga jualnya yang tinggi di pasaran dunia. Pada tahun 1869 Nienhuys mendirikan *Deli Maatschappij*, perseroan terbatas pertama yang beroperasi di Hindia Belanda

(Bremen,1997:26). Hasil penjualan maupun keuntungan terus berlanjut hingga lebih dua kali lipat. Sejak saat itulah Deli menjadi termasyhur di dunia sebagai kawasan produksi daun pembungkus cerutu (Bremen,1997:25).

Setelah meninggalnya Sultan Mahmud Perkasa Alam pada 1873, tampuk pemerintahan dipegang oleh putra mahkota yang bergelar Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sultan sebelumnya yang sangat memberikan kemewahan bagi kerajaan masih diteruskan. Para investor semakin banyak membuka lahan perkebunan, dan kemakmuran Kerajaan Deli semakin menjanjikan pula. Kelak melalui perolehan laba yang besar, serta bantuan pihak *Deli Maatschappij*, Sultan Ma'mun Al-Rasyid membangun istana baru di daerah Medan, yang dimulai pada tahun 1888 dan selesai tahun 1891. Setelah bangunan yang diberi nama Istana Maimoon itu selesai, maka pusat pemerintahan Kerajaan Deli tidak lagi berada di daerah Labuhan.

III. Labuhan Deli sebagai pusat Kerajaan Deli

Bekas pusat Kerajaan Deli itu menempati daerah yang sekarang merupakan Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Wilayah kecamatan yang berada di bagian utara – pada jarak sekitar 20 kilometer - kota Medan ini didominasi dataran rendah alluvial yang terbentuk dari sedimentasi Sungai Deli yang mengalir di daerah ini. Sungai cukup besar itu berhulu di bagian utara perbukitan sekeliling Danau Toba yang mengalir ke perairan Selat Malaka (Jufrida & Soedewo, 2004:30).

Keberadaan pusat Kerajaan Deli di Labuhan ditandai antara lain oleh kelenteng, kawasan perdagangan dengan bangunan-bangunan bergaya arsitektur Cina dan Eropa, bekas dermaga, mesjid kerajaan yakni Mesjid Al-Osmani, dan tapak Balai Kerapatan serta Opas Raja (Jufrida & Soedewo,2004:32--36).

Nama “Labuhan” itu sendiri sebenarnya berkaitan erat dengan peranan Sungai Deli sebagai tempat para pedagang berlabuh. Setengah mil ke arah hilir dari muara sungai tersebut terdapat dermaga Kerajaan Deli. Hal ini menjadikan daerah tersebut diberi nama “Labuhan” ada yang menyebut “Bandar Labuhan”, “Pekan Labuhan”, atau “Boom Lama” (Veth,1877 dalam Ratna,2006:153). Bukti terkuat mengenai keberadaan Kerajaan Deli di Labuhan adalah informasi yang didapat dari John Anderson saat mengunjungi daerah pantai timur Sumatera pada tahun 1823. Salah satu tempat yang disinggahinya adalah pusat Kerajaan Deli yang kala itu sudah berada di daerah Labuhan. Perahu yang membawanya merapat di daerah hilir sungai Deli, sebelum akhirnya disambut oleh wakil sultan yang kemudian mengantarkannya menuju istana (Jufrida & Soedewo,2004:32).

IV. Latar belakang perpindahan Kerajaan Deli dari Labuhan ke Medan

Menurut Sjoberg (1980:27 dalam Tjandrasasmita,1985:762) prasyarat untuk menentukan peletakan pusat kota kerajaan ditentukan oleh beberapa faktor pendukung di antaranya: 1) ekologi yang cocok, 2) teknologi yang maju baik dalam suasana atau lingkungan pertanian maupun non pertanian, dan 3) organisasi sosial yang kompleks, yang di atasnya terdapat perkembangan struktur kekuasaan. Ketiga hal tersebut berlaku juga dengan keberadaan pusat pemerintahan Kerajaan Deli dalam mencari lokasi yang strategis sebagai pusat pemerintahannya. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Deli dipaparkan sebagai berikut.

IV.1. Faktor ekologi (lingkungan alam)

Lingkungan sekitar lokasi Kerajaan Deli berada di daerah aliran Sungai Deli yang mengalir ke utara dan bermuara ke laut (berjarak sekitar 5 km). Kondisi itu menyebabkan daerah sekitar kawasan tersebut dipengaruhi oleh aliran air sungai yang mengalami pasang naik dan pasang surut. Curah hujan yang tinggi di bagian hulu menyebabkan terjadinya pasang naik Sungai Deli. Demikian juga pasang naik dan pasang surut air laut sangat mempengaruhi kondisi sungai tersebut. Pasang naik dan pasang surut Sungai Deli menyebabkan air sungai mencapai daratan kemudian tergenang dan menjadi rawa-rawa. Rawa-rawa dapat terjadi di sekitar aliran sungai itu maupun di bagian muara sungainya.

Terutama rawa-rawa yang terdapat di sekitar muara sungainya dapat dikategorikan ke dalam jenis rawa pasang naik/pasang surut. Jenis rawa tersebut taraf kelengasannya dipengaruhi oleh gerakan pasang naik dan pasang surut air laut, yang merambat ke pedalaman lewat *estuari* (saluran mengalir alamiah yang berhubungan langsung dengan laut, tempat mengalirnya air pasang dari laut ke darat dan air surut dari darat ke laut). Air yang meluap ke daratan menyusuri batang sungai, atau ke atas daratan antar sungai (*interfluvial*) merupakan air sungai yang terbencong oleh pasang naik air laut. Oleh karena tekanan hidrostatis, air laut akan meninggi pada waktu pasang, air laut dapat pula menyusup ke darat melalui saluran-saluran di bawah muka tanah. Kejadian ini menyebabkan air tanah asin/payau dan atau permukaannya meninggi/mendangkal (Notohadiprawiro,1986:124). Kondisi demikian juga terjadi pada Sungai Deli, terutama di daerah sekitar muaranya terjadi pendangkalan.

Selain itu pendangkalan yang terjadi pada muara Sungai Deli adalah akibat dari timbunan lumpur letusan Gunung Sibayak yang dibawa oleh aliran sungai dari hulu ke hilir. Ketika musim hujan tiba dengan curah hujan yang tinggi sering mengakibatkan banjir dan membawa material

banjir dari tempat yang lebih tinggi (hulu) ke muara Sungai Deli. Hal itu juga menjadi faktor penyebab pendangkalan aliran Sungai Deli. Mendangkalnya Sungai Deli, yang difungsikan sebagai sarana transportasi bagi pedagang dari beberapa daerah maupun bangsa asing, membuat dermaga Labuhan akhirnya ditinggalkan. Proses pendangkalan itu juga membuat air sungai meluap ke daratan sehingga daratan sering mengalami banjir.

IV. 2. Faktor ekonomi

Di sepanjang pesisir timur Sumatera terkenal sebagai tempat berlakunya percobaan kapitalis terbesar zaman kolonial di Indonesia. Dalam waktu singkat, pada tahun 1863 perkebunan-perkebunan besar bangsa Eropa menunjukkan adanya aktivitas. Mulai dari penanaman tembakau, getah sampai ke perkebunan kelapa sawit (Perret,1997:89--90). Setelah itu masuklah Nienhuys sebagai pelopor penanaman tembakau di Sumatera timur secara besar-besaran. Setidaknya 50 tahun sebelumnya masyarakat setempat sudah mempunyai lahan perkebunan yang sering disebut perkebunan tempatan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan terbaginya masyarakat menjadi dua golongan. Pertama, golongan masyarakat kawasan pedalaman yang menguasai pemetikan dan pengangkutan hasil hutan, lada, beras, rotan dan lain-lain ke kawasan pantai. Adapun golongan kedua, yaitu masyarakat kawasan pantai yang kekayaannya berdasarkan atas monopoli perdagangan dengan bangsa asing (Perret,1997:89--91).

Pada tahun 1823, saat John Anderson, seorang Inggris dari *East India Company* datang ke kawasan pantai timur laut Sumatera Utara, beliau mencatat bahwa setidaknya 1000 kapal pengangkut berlayar ke Semenanjung Malaka. Hasil-hasil tersebut bukan hanya kapur barus, kemeyan, damar rotan, lilin dan kayu tetapi juga hasil pertanian seperti beras, sayur-sayuran, getah, tembakau, gambir, dan terutama lada (Perret,1997:91). Hal ini menimbulkan terjadinya hubungan dagang dengan masyarakat setempat yang menerima tekstil, candu, barang pecah belah dan lain-lain melalui dermaga ini.

Pembukaan lahan perkebunan ini semakin lama mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 1873 terdapat 15 *onderneming*, sedangkan pada tahun 1884 sudah menjadi 86 *onderneming*: 44 di daerah tanah Deli, 20 di Langkat, 9 Serdang dan 3 Bedagai. Ditambah lagi dengan masuknya para pengusaha asing yang membuka lahan perkebunan teh dan kelapa sawit sampai seluas 6531 ha (Perret,1997:76--80). Karena lahan perkebunan dibuka secara tidak merata di setiap daerah *onderneming*, menyebabkan pihak perkebunan membuka jalur transportasi baru yaitu dengan dibukanya jalur lintas darat (jalan raya) dan jalur kereta api.

Sarana pembuatan jalan raya dipelopori oleh *Deli Maatschappij* pada tahun 1880-an dari Medan ke Sunggal sepanjang 10 km, Medan--Belawan sepanjang 22 km, Medan--Pangkalan

Brandan melewati Binjai dan Tanjung Pura sepanjang 107 km, dan dari Lubuk Pakam ke Bangun Purba sepanjang 20 km. Selain itu dari Medan--Tebing Tinggi--Asahan, Tanjung Balai, terus ke perbatasan Kualuh dan ke daerah lainnya yang mencapai panjang 115 km. Dari tahun 1863--1918 hampir 500 km jalan raya terbangun. (Broersma, 1932 dalam Sumarno, 2006:2--3). Pembangunan jalan raya ini seiring dengan pembuatan jalur kereta api yang dipelopori *Deli Spoorweg Maatschappij* 1883 yang membuka rute dari Medan-Labuhan sepanjang 16,243 km, Medan-Binjai 20,888 km, Medan-Delitua 11,249 km, Labuhan-Belawan 6,162 km, Medan-Serdang 20,122 km, dan Serdang-Perbaungan sepanjang 17,688 km. Pembukaan jalur kereta api ini juga dilakukan secara besar-besaran dari Brandan, Tanjung Pura, Besitang, Binjai, Tebing Tinggi, Siantar, Tanjung Balai, Teluk Nibung dan lain-lain. Pembukaan jalur kereta api dari tahun 1883--1901 untuk wilayah sekitar kota Medan mencapai 103,308 km (Sumarno, 2006:3--4). Kondisi transportasi di Labuhan yang berlumpur waktu musim hujan, ongkos pengangkutan yang mahal, dan alat pengangkutan yang masih sederhana, menjadi kendala bagi ekspor-import komoditas perkebunan, sehingga dengan dibukanya jalur darat sebagai sarana transportasi perdagangan membuat transportasi sungai (Labuhan) semakin hari ditinggalkan para pedagang.

IV.3 Faktor sosial politik

Kondisi lingkungan alam Labuhan Deli semakin mengkhawatirkan karena sering banjir akibat pendangkalan atau curah hujan yang tinggi di bagian hulu, menyebabkan para pedagang dan pengusaha terus berusaha mencari tempat tinggal yang lebih nyaman. Kota Medan yang letaknya tidak jauh dari Labuhan merupakan tempat yang cocok bagi para pendatang untuk berpindah. Selain itu kota ini juga memiliki dataran yang lebih tinggi sehingga tidak tergenang, menjadikan Kota Medan lebih berpotensi sebagai daerah pengembangan dibandingkan dengan Labuhan. Tidak mengherankan jika penempatan kontrolir Belanda pertama Cats Baron de Roet (1866) dan tiga pengusaha berbangsa Eropa pada tahun 1867 yang semula berada di hulu Labuhan tepi Sungai Deli dipindah ke Kota Medan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kantor administrasi Nienhuys yang sebelumnya berada di Labuhan juga dipindah ke Kota Medan pada tahun 1869, begitu juga kedudukan Asisten Residen Belanda tahun 1879 dipindah ke kota ini.

Perpindahan kantor-kantor administrasi tersebut segera diikuti juga dengan berpindahnya ibu kota Residen Sumatera Timur ke Kota Medan pada tahun 1887, yang sebelumnya berada di Bengkalis. Tiga tahun berikutnya yaitu pada tahun 1891 Kesultanan Deli yang pemerintahannya berpusat di Labuhan juga harus meninggalkan kota ini ke Kota Medan di masa pemerintahan Sultan Makmun Perkasa Alamsyah. Dengan berpindahnya kantor-kantor para investor dan kantor pemerintahan ke kota Medan membuat Labuhan ditinggalkan oleh

para pedagang maupun pejabat pemerintahan. Lambat laun Medan menjadi daerah yang ramai karena hampir semua kantor-kantor dan para pedagang turut bermukim di sana. Labuhan menjadi sepi sebaliknya Medan berkembang sebagai kota perekonomian.

V. Penutup

Faktor ekologi sebagai salah satu penentu pertimbangan penempatan sebuah pusat kerajaan, ternyata mempunyai dampak yang cukup nyata dalam kasus yang terjadi di Kerajaan Deli. Kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air sungai, serta rawan banjir sehingga tidak mendukung kenyamanan dan keamanan, membuat Kesultanan Deli tidak mampu lagi bertahan. Kemudian diputuskan untuk memindahkan lokasi pusat pemerintahan ke daerah yang lebih nyaman dan aman, yakni Kota Medan. Selain faktor lingkungan, terdapat beberapa faktor lain yang mendukung perpindahan pusat pemerintahan tersebut, yaitu faktor ekonomi dan sosial politik.

Dermaga Labuhan sebagai satu-satunya bandar pelabuhan yang terpenting sebelumnya, lama kelamaan tidak dapat berfungsi lagi sebagai tempat sandar perahu akibat terganggu oleh endapan lumpur sungai. Para pedagang beralih ke Belawan sebagai pelabuhan yang lebih modern yang pembangunannya bersamaan dengan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung, yakni prasarana dan sarana transportasi berupa jalan raya dan jalur kereta api.

Kepustakaan

- Breman, Jan, 1997. **Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20**. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV
- Husny, Tengku HM Lah, 1975. **Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur 1612 -- 1950**. Medan: BP Husni
- Jufrida, 1999. *Arsitektur Istana Maimoon, Medan, Sumatera Utara*, dalam **Berkala Arkeologi Sangkhakala No. 05/1999**. Medan: Balai Arkeologi Medan, hal. 38 -- 47
- & Ery Soedewo, 2004. *Jejak Kejayaan Deli di Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan*, dalam **Berkala Arkeologi Sangkhakala No. 13/2004**. Medan: Balai Arkeologi Medan, hal. 30 -- 38
- Koestoro, Lucas Partanda et al., 2006. **Medan, Kota Di Pesisir Timur Sumatera Utara Dan Peninggalan Tuanya**. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono, 1986. **Tanah Estuarin, Watak, Sifat, Kelakuan dan Kesuburannya**. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pelzer, Karl J, 1985. **Toeang Keboen dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria**. Jakarta: Sinar Harapan
- Perret, Daniel. 1997. *Dari Perkebunan Tempatan Hingga Perladangan Kolonial: Perubahan Politik, Ekonomi dan Sosial di Sumatera Timur Laut*, dalam **Cultures in Contact**. Jakarta: EFEO, hal. 89 -- 113
- Ratna, 2006. *Labuhan Deli: Riwatmu Dulu*, dalam **Historisme No. 22**. Medan: Departemen Sejarah FS USU, hal. 7 -- 13
- Sinar, Tengku Luckman, 1971. **Sari Sejarah Serdang**. Medan: tp

- Sumarno, Edi, 2006. *Mundurnya Kota Pelabuhan Tradisional di Sumatera Timur pada Periode Kolonial*, dalam **Historisme No. 22**. Medan: Departemen Sejarah FS USU, hal. 1 -- 6
- Syaifuddin, Wan, 2003. **Kronik Mahkota Kesultanan Serdang**. Medan: Yandira Agung